

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga perbankan memiliki fungsi sebagai lembaga perantara keuangan atau financial intermediary. Sebagai lembaga perantara keuangan, artinya bank menjembatani antara dua nasabah yang berbeda, satu pihak merupakan nasabah yang kelebihan dana (*surplus unit*) dan pihak lainnya merupakan nasabah yang membutuhkan dana (*defisit unit*) (Ismail, 2018). Selain itu, lembaga perbankan memiliki peranan yang sangat penting dalam struktur perekonomian di setiap negara tanpa terkecuali, Indonesia.

Perbankan di Indonesia memiliki peran strategis dalam menyetarakan dan menyeimbangkan masing-masing unsur dari Trilogi Pembangunan yaitu pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional. Peran yang strategis tersebut disebabkan oleh fungsi utama bank dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat secara efektif dan efisien, dengan berasaskan demokrasi ekonomi yang mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Dalam upaya mendukung kesinambungan terkait Trilogi Pembangunan, lembaga perbankan telah menunjukkan perkembangan yang pesat, seiring dengan kemajuan pembangunan di Indonesia dan perkembangan perekonomian serta sejalan dengan peningkatan tuntutan kebutuhan masyarakat akan jasa perbankan (Kasmir, 2010).

Lembaga perbankan di Indonesia harus mampu menghadapi persaingan yang bersifat global, mampu melindungi dana yang dititipkan masyarakat, serta yang terpenting ialah mampu menyalurkan dana masyarakat tersebut ke bidang-bidang yang produktif bagi pencapaian sasaran pembangunan (Djumhana, 2016). Penyaluran dana kepada masyarakat ialah berupa pembiayaan ataupun kredit. Pembiayaan yang diberikan diharapkan dapat menimbulkan gairah usaha masyarakat sehingga usaha yang dijalankan dapat

berkembang. Oleh karena itu sudah seharusnya bank menyalurkan pembiayaan kepada bidang-bidang yang produktif terutama pada pelaku UMKM yang merupakan tonggak utama untuk perekonomian Indonesia.

Menurut (Partomo & Soejoedono, 2004) Keberadaan UMKM selama ini telah menjadi sumber kehidupan bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan pilar terpenting dalam perekonomian nasional. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi. (Hartanto, 2021). Kemudian, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memiliki kontribusi dalam menyerap tenaga kerja (Nurrohmah, 2015). Kemampuan tersebut turut berperan dalam mengurangi pengangguran di Indonesia yang artinya dapat menaikkan pendapatan per kapita masyarakat di Indonesia. Sehingga, dengan naiknya pendapatan perkapita turut menyumbang pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Selain itu ketika terjadinya krisis moneter dan berbagai sektor terkena dampak seperti pada korporasi yang tidak dapat bertahan dengan baik, justru sektor UMKM merupakan salah satu sektor yang dapat bertahan ketika terjadinya gejolak perekonomian tersebut. Sehingga, ketika terjadi krisis ekonomi yang melanda Indonesia, pemerintah sangat mengandalkan peran UMKM untuk memperkecil dampak negatif dari krisis Indonesia (Tambunan, 2009).

Terdapat beberapa alasan UMKM terus bertahan disaat krisis ekonomi adalah karena, pertama, sebagian besar UMKM memproduksi barang konsumsi dan jasa-jasa dengan elastisitas permintaan terhadap pendapatan yang rendah. Kedua, sebagian besar UMKM menggunakan modal sendiri tanpa bantuan modal dari perbankan sehingga ketika terjadi krisis di sektor perbankan dan suku bunga bank naik maka tidak mempengaruhi kinerja dari UMKM itu sendiri. Ketiga, krisis ekonomi yang berkepanjangan terjadi kasus pemberhentian tenaga kerja di sektor formal sehingga terjadi peningkatan

jumlah pengangguran, pada akhirnya menyebabkan para penganggur memasuki sektor informal dengan melakukan kegiatan usaha yang berskala kecil yang mengakibatkan terjadinya peningkatan jumlah UMKM.

Meskipun berperan besar pada perekonomian, para pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM) di Indonesia jarang mendapat akses dari lembaga keuangan khususnya pada tingkat usaha mikro. Untuk mengatasi kelemahan tersebut dibutuhkan pihak lain yang dapat membantu. Selain itu, UMKM memiliki hambatan dan rintangan yang dihadapi dalam meningkatkan kemampuan usaha sangat kompleks dan meliputi berbagai aspek yang mana salah satu dengan yang lainnya saling berkaitan antara lain; kurangnya permodalan baik jumlah maupun sumbernya, kurangnya kemampuan manajerial dan keterampilan beroperasi serta tidak adanya bentuk formil dari perusahaan, lemahnya organisasi dan terbatasnya pemasaran. Disamping hal-hal terdapat juga persaingan yang kurang sehat dan desakan ekonomi sehingga mengakibatkan ruang lingkup usaha menjadi terbatas (Suci, 2017).

Kendala tersebut juga dijelaskan pada penelitian yang dilakukan oleh (Hartono, 2018) yang menunjukkan bahwa masalah krusial yang dihadapi oleh UMKM ialah rendahnya permodalan dan kesulitan dalam menambah permodalan baik untuk modal kerja ataupun investasi. Semestinya hal tersebut dilakukan oleh lembaga keuangan terkhusus perbankan, akan tetapi sulitnya proses untuk pengajuan pembiayaan membuat banyak pelaku UMKM yang tidak menerima pembiayaan. Kemudian, pada penelitian yang dilakukan oleh (Nurul Izzati Septiana, 2019) menjelaskan bahwa permodalan merupakan aspek permasalahan yang sering dihadapi pelaku UMKM yang ingin mengembangkan usahanya dan hal tersebut terjadi karena terbatasnya akses untuk memperoleh pembiayaan dan ditambah lagi bahwa pemberian pembiayaan untuk modal yang belum tepat sasaran menjadi masalah yang kerap terjadi.

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat masalah yang dihadapi para pelaku UMKM ketika akan mengembangkan usahanya, masalah tersebut ialah terkait permodalan ataupun penambahan modal yang dapat digunakan untuk modal kerja ataupun investasi. Selain masalah permodalan terdapat pula masalah seperti rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia, rendahnya produktivitas, rendahnya efisiensi dan efektifitas karena penggunaan peralatan yang minim, dan belum terlalu memanfaatkan teknologi untuk mengurangi kesalahan dalam operasional. Seharusnya masalah tersebut dapat diatasi ketika mendapatkan tambahan permodalan dari lembaga keuangan terkhusus perbankan dimana tambahan modal tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas dan bukan tidak mungkin memperbesar ekspansi pasar seperti menambah unit usaha. Akan tetapi pada kenyataannya permodalan masih menjadi salah satu masalah utama dalam pengembangan usaha bagi para pelaku UMKM.

Di daerah Arjawinangun, sebagian besar penduduknya ialah memiliki usaha mikro, kecil dan menengah. Hal tersebut ditunjang dengan adanya pasar sandang tegal gubug yang dapat dikatakan sentra kain/pakaian terbesar di daerah Cirebon. Tapi para pelaku UMKM bukan hanya di pasar sandang tegal gubug saja tetapi pada pasar arjawinangun juga pada daerah sekitar arjawinangun. Setelah melakukan observasi terdapat cukup banyak pelaku usaha UMKM yang memiliki potensi untuk melakukan perkembangan usaha baik untuk meningkatkan produktivitas ataupun menambah cabang usaha. Jika hal itu terjadi maka akan berdampak yang cukup baik bagi usaha itu sendiri, bukan tidak mungkin usaha- usaha tersebut mampu membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar dan hal tersebut tentunya memiliki dampak baik karena dapat mengurangi tingkat pengangguran. Pelaku usaha UMKM khususnya di pasar sandang tegal gubug memiliki potensi yang cukup besar untuk terus berkembang dalam meningkatkan usaha UMKM. Karena pangsa pasar mereka tidak hanya berasal dari daerah Cirebon semata, akan tetapi dari daerah lain seperti Jakarta, Bandung dan kota besar lainnya yang sudah mengetahui pasar sandang tegal gubug. Terlepas dari berkembangnya usaha di pasar tegal gubug, masih terdapat pelaku usaha

yang membutuhkan tambahan modal untuk meningkatkan usaha mereka seperti untuk memperbesar jumlah produksi, menambah jumlah tenaga kerja ataupun aspek lainnya terkait dengan perluasan usaha. Akan tetapi, nampaknya pelaku usaha kesulitan untuk mendapatkan tambahan modal untuk mengembangkan usahanya.

Dari hal diatas maka dapat disimpulkan baik dalam skala nasional maupun daerah termasuk daerah yang akan dijadikan tempat penelitian kali ini, bahwa hampir sebagian besar pelaku UMKM mengalami problematika *relative* sama dalam usahanya, dalam usaha mikro dimana akses mereka untuk mendapatkan sumber permodalan dalam lembaga keuangan sangat kesulitan bahkan tidak ada akses untuk mendapatkan sumber modal. Modal dalam sebuah usaha merupakan salah satu hal yang sangat penting dimana sebuah usaha dapat menjalankan aktivitasnya baik dari awal pendirian usaha sampai proses menjalankan usaha diperlukan modal untuk memenuhi segala sesuatu yang diperlukan untuk menjalankan usaha.

Selain itu, di daerah arjawinangun terdapat salah satu bank syariah yaitu Bank Syariah Indonesia KCP Arjawinangun. Seperti yang telah diketahui bahwa salah satu kegiatan bank konvensional maupun syariah ialah menyalurkan dana. Dalam hal tentu ada kaitannya dengan UMKM sekitar karena pada dasarnya Bank Syariah Indonesia memiliki produk pembiayaan KUR dan Usaha Mikro yang telah disalurkan kepada masyarakat untuk usaha UMKM sejak BRI Syariah KCP Arjawinangun hadir. Akan tetapi sejauh ini belum ada penelitian yang membahas perihal efisiensi dan efektifitas penyaluran pembiayaan yang telah disalurkan bank terhadap perkembangan usaha nasabah. Karena seperti yang dilihat bahwa terkhusus dalam pasar sandang tegalgubug belum adanya perkembangan usaha yang terjadi. Hal tersebut dilihat dari tidak adanya ekspansi keluar seperti menambah cabang usahanya di daerah yang mungkin memiliki potensi untuk dapat terus berekspansi secara luas. Ditambah lagi terlihat masih sedikitnya pelaku usaha yang tidak menggunakan teknologi yang dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam menjalankan usahanya. Selain itu ditambah lagi dengan keadaan pandemi yang terjadi beberapa tahun belakangan hingga sekarang

yang menyebabkan dampak negatif di berbagai sektor termasuk UMKM. Cukup banyak pelaku UMKM yang mengalami penurunan omset, mengalami kebangkrutan dan tak sedikit pula tenaga kerja yang terkena PHK. Hal ini tentunya tidak dapat dibiarkan terus-menerus tanpa adanya upaya memulihkan kondisi ekonomi nasional. Dibutuhkan kerjasama baik pemerintah, lembaga keuangan termasuk perbankan serta pelaku usaha UMKM untuk memperbaiki kondisi ekonomi yang sedang lesu. Lembaga perbankan dalam hal ini tentunya harus tetap menyalurkan dana kepada pelaku usaha meskipun diperlukan kehati-hatian pula dalam menyalurkan dana mengingat kondisi ekonomi yang memungkinkan terjadinya kredit macet sehingga berdampak pada kegiatan operasional bank. Oleh karena itu sudah semestinya lembaga bank mampu mengamati situasi terkait sektor atau usaha apa saja yang memiliki potensi untuk mengembangkan usahanya. Padahal jika lembaga perbankan dapat menyalurkan dana secara optimal, efisien dan efektif maka bukan tidak mungkin akan banyak usaha UMKM yang mengalami perkembangan usaha dan hal ini berpotensi besar baik dalam penyerapan tenaga kerja, meningkatkan dan memperkuat kondisi perekonomian nasional.

Dengan melihat fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui pengaruh pembiayaan BSI KUR dan BSI Usaha Mikro khususnya di Bank Syariah Indonesia KCP Arjawinangun terhadap perkembangan usaha mikro. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul. “Pengaruh Pembiayaan BSI KUR dan BSI Usaha Mikro Terhadap Perkembangan Usaha Nasabah Pembiayaan Bank Syariah Indonesia KCP Arjawinangun”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat di identifikasikan masalah-masalah sebagai berikut:

- 1) Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sering menghadapi permasalahan dari aspek modal.
- 2) Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) kesulitan untuk mendapatkan tambahan modal di masa pandemi saat ini, karena lembaga

keuangan termasuk bank konvensional menekan penyaluran dana karena terlalu berisiko

- 3) Pembiayaan yang disalurkan bank belum terlihat memberikan pengaruh dalam perkembangan usaha nasabah
- 4) Pembiayaan BSI KUR yang disalurkan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Arjawinangun kepada nasabah belum diketahui seberapa besar pengaruhnya terhadap perkembangan usaha nasabah
- 5) Pembiayaan BSI Usaha Mikro yang disalurkan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Arjawinangun kepada nasabah belum diketahui seberapa besar pengaruhnya terhadap perkembangan usaha nasabah

C. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis akan membatasi masalah yang akan diteliti, peneliti ini hanya akan membahas pengaruh produk pembiayaan BSI KUR dan BSI Usaha Mikro terhadap perkembangan usaha nasabah (Bank Syariah Indonesia KCP Arjawinangun)

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang di atas, maka muncul rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Apakah Pembiayaan BSI KUR berpengaruh Terhadap Perkembangan Usaha Nasabah ?
- 2) Apakah Pembiayaan BSI Usaha Mikro berpengaruh Terhadap Perkembangan Usaha Nasabah ?
- 3) Apakah Pembiayaan BSI KUR dan Pembiayaan BSI Usaha Mikro berpengaruh Terhadap perkembangan usaha Nasabah ?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan BSI KUR terhadap perkembangan usaha nasabah.

- b. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan BSI Usaha Mikro terhadap perkembangan usaha nasabah.
- c. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan BSI KUR dan pembiayaan BSI Usaha Mikro terhadap perkembangan usaha nasabah

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Ilmiah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan ilmiah bagi mahasiswa IAIN Syekh Nurjati khususnya Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

b. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi ataupun masukan untuk Bank Syariah Indonesia tekhusus KCP Arjawinangun dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyaluran dana.

c. Manfaat Akademik

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bentuk perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, khususnya program studi perbankan syari'ah sebagai sumbangsih pikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui serta mempermudah pembahasan dan memperoleh gambaran dari keseluruhan, maka dijelaskan sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang uraian secara garis besar permasalahan penelitian yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II : KAJIAN TEORI

Bab ini menjelaskan mengenai teori tentang konsep umum pembiayaan, konsep umum Pembiayaan BSI KUR dan BSI Usaha Mikro, UMKM, Bank Syariah Indonesia, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran, dan Hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini sebagai dari proses penelitian. Adapun pembahasan dalam bab ini meliputi tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, metode penelitian, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, dan teknik analisis data.

BAB IV : ANALISIS PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan mengenai kondisi objektif penelitian dan hasil penelitian tentang deskripsi obyek penelitian, hasil analisis data dan pembahasan hasil analisis data, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah (pembuktian hipotesis).

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan penutup. Kesimpulan merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dirumusan masalah setelah melalui analisis pada bab sebelumnya. Sedangkan saran merupakan komentar dan masukan dari peneliti mengenai permasalahan yang diteliti sesuai dengan hasil kesimpulan yang diperoleh.